

4. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 135.221.518.786,-** atau 6,76% dari total alokasi APBD tahun 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. Alokasi sebesar **Rp 135.221.518.786,-** dapat terealisasi sebesar **Rp 17.636.968.686,-** atau **13,04%**. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.D.4.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	126.948.853.700	10.730.575.924
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100.000.000	97.823.900
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.099.700.000	1.082.935.325
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	50.000.000	41.460.000
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	124.391.000.000	8.299.216.450
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.153.438.500	1.068.827.841
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	154.715.200	140.312.408
B	Belanja Tidak Langsung	8.272.665.086	6.906.392.762
1	Belanja Pegawai	8.272.665.086	6.906.392.762
	Jumlah Total	135.221.518.786	17.636.968.686

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

b. Program dan Kegiatan**1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya daya saing

berbasis efisiensi dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen. Melalui peningkatan informasi kepada masyarakat tentang barang kena cukai ilegal serta pemberantasannya, diharapkan masyarakat akan mengenal barang kena cukai ilegal di pasaran dan lebih paham terkait aturan-aturan yang berlaku di bidang cukai. Sehingga masyarakat dapat membedakan pita cukai rokok yang asli dan yang palsu serta bisa mencegah peredaran rokok ilegal yang ditawarkan di toko-toko.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Program ini diarahkan pada pengembangan jaringan distribusi perdagangan, pengembangan akses pasar, pengembangan usaha berbasis ekspor serta pemasaran *online*.

Melalui pengembangan jaringan distribusi akan terjamin ketertiban dan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan akan diketahui titik-titik distribusi di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini juga didukung oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah yang senantiasa memantau harga kebutuhan pokok secara rutin, sehingga akan tetap terjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan dan diharapkan agar jaringan distribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Program ini bertujuan membina, menata dan menertibkan pedagang kaki lima agar tercipta keindahan kota sesuai dengan peraturan yang ada. Pedagangn kaki lima yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, tempat yang dianggap strategis yang jauh dari kesan rapi dan bersih dibina dan ditata/ditertibkan untuk berjualan di tempat sesuai peruntukannya.

4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) perdagangan dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan, meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakat. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi pasar tradisional melalui perwujudan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman serta sebagai penggerak ekonomi daerah.

Kegiatan berupa pembangunan/revitalisasi pasar yang bertujuan untuk mewujudkan pasar tradisional yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman dan nyaman sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen. Di samping itu juga mendorong pasar tradisional bersaing dengan pusat perbelanjaan modern

III.D.4. Urusan Pilihan Perdagangan

sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar tradisional.

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar.

6) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Tabel III.D.4.2
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja EKPPD

No.	Indikator Kinerja berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100%	2.348.430,61 ----- x 100% 14.150.509,87 = 16,60%	2.551.521,52 ----- x 100% 15.337.191,80 = 16,64%	2.816.336,46 ----- x 100% 16.393.517,47 = 17,18%**)
2	Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	\$65.125.055,91 - \$ 179.779,00 = \$ 64.945.346,91	\$ 47.488.411,51 - \$ 279.413,61 = \$ 47.208.997,90	\$ 48.443.690,38 - \$ 0 = \$ 48.443.690,38

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah & Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017

**) data prediksi

Capaian kinerja urusan perdagangan bisa dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di mana pada tahun 2017 sebesar 17,18%. Kontribusi ini meningkat 3,24% dari tahun 2016, dan jika dilihat dari nilainya mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.551.521,52,- di tahun 2016 naik menjadi Rp 2.816.336,46,- di tahun 2017.

III.D.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Capaian ini didorong oleh semakin berkembangnya perdagangan barang-barang di tingkat lokal, meskipun pasar induk belum terbangun akan tetapi perdagangan kecil berupa toko-toko banyak bermunculan.

Sedangkan untuk indikator ekspor bersih perdagangan di tahun 2017 sebesar \$ 48.443.690,38 kondisi ini meningkat sebesar 2,6% dibandingkan tahun 2016. Capaian ini hanya disumbang oleh ekspor bersih perdagangan yang berasal dari sepuluh perusahaan yang ada di Kabupaten Wonosobo karena di tahun 2017 Kabupaten Wonosobo tidak melakukan impor perdagangan.

Tabel III.D.4.3
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0.8	0.88	0.8	90.91	→
2	Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0.1	0.2	0.9	450.00	○
3	Persentase kenaikan UDKM	15%	16%	15%	93.75	→
4	Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar	5.5	6	5.5	91.67	→
5	Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang	19.1	21	20	95.24	→
6	Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	0.04	0.08	0.05	62.50	↓
7	Persentase kenaikan negara tujuan ekspor	25%	11%	25%	238.10	○
8	Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD)	47.208.997,90	54.200.000,00	48.443.690,38	89.38	↓
9	Persentase los/kios yang dimanfaatkan	60%	65%	85%	130.77	○
10	Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi	54%	46%	100%	217.39	○
11	Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya	0.3	1	0.3	50.00	↓

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2017

Keterangan Status Capaian:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah >= 100% |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90% - 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian <= 90% |

III.D.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Apabila dilihat dari capaian kinerja RKPD 2017 terdapat 11 capaian kinerja urusan perdagangan di mana 4 indikator dalam status sudah tercapai, 4 indikator tidak tercapai dan 3 indikator tidak tercapai dan perlu upaya keras, yaitu Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama, Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD), Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya. Sehingga masih perlu upaya keras untuk lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program kemitraan, peningkatan daya saing produk serta pembinaan dan pemberdayaan PKL.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Perdagangan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.D.4.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Perdagangan

No	Masalah	Solusi
1.	Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih representatif untuk kelancaran distribusi barang dan jasa.	▪ Melakukan pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan. ▪ Merevitalisasi Pasar Daerah.
2.	Tingginya jumlah unit usaha industri non formal dan perdagangan tanpa izin	▪ Mendata dan menertibkan data basis pelaku usaha. ▪ Peningkatan industri dari status non formal ke formal melalui peningkatan kapasitas usaha.
3.	Belum terbentuknya unit Kerja Pengawasan Metrologi Legal pada unit Perlindungan Konsumen Disdagkopukm Kab. Wonosobo, sehingga tugas-tugas dibidang pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal.	▪ Penambahan formasi PNS untuk diperlukan penambahan tenaga fungsional kemetrologian, agar kinerja pembinaan dan pengawasan UTTP/BDKT lebih optimal.
4.	Minimnya tertib niaga bagi para pelaku usaha perdagangan	○ Mengembangkan/mengikuti pasar lelang sebagai intermediasi antara petani dan pembeli baik pedagang pengecer, pengumpul, pedagang besar dan konsumen

III.D.4. Urusan Pilihan Perdagangan

No	Masalah	Solusi
		akhir dengan jaringan pemasaran yang lebih pendek dan transparan sehingga margin keuntungan bisa dinikmati petani. - o Membangun resi gudang - o Menyederhanakan saluran distribusi.
5.	Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum maksimal.	o Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah.
6.	Dengan diberlakukannya perdagangan bebas, banyak produk asing yang masuk ke Indonesia sehingga tingkat persaingan produk lokal semakin tinggi.	- o Penguatan jejaring kekuatan ekonomi perdagangan. - o Peningkatan standarisasi produk, sehingga produk lokal bisa menembus ekspor. - o Meningkatkan daya saing pelaku usaha. - o Menerapkan cinta produk lokal dan bangga beli produk Wonosobo.
7.	Masih kurangnya ketersediaan sarana/lokasi bagi pedagang kaki lima sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada peruntukannya	- o Mengupayakan lokasi bagi PKL. - o Penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.
8.	Pelaksanaan pembangunan pasar induk berjalan sangat lambat karena pedagang belum mau menempati tempat relokasi yang telah disediakan serta masih adanya masalah intern di pihak penyedia jasa.	- o Melakukan relokasi pedagang. - o Membuat jalan alternatif masuk lokasi penampungan pasar. - o Melakukan koordinasi intensif agar pihak penyedia jasa segera melaksanakan pembangunan pasar induk.